



Peningkatan Kerja Sama Pertahanan dan Keamanan Indonesia-Jepang: Mempromosikan Demokrasi di Perairan Indo-Pasifik

Oleh

Rafyoga Jehan Pratama Irsadanar

Mahasiswa Magister, Graduate School of International Cooperation Studies, Kobe University
irsadanar.rafyoga@gmail.com

Pendahuluan

Artikel ini menggambarkan kerja sama pertahanan dan keamanan sebagai medium untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi. Dalam konteks yang lebih spesifik, artikel ini mengelaborasi upaya peningkatan hubungan keamanan antara dua negara demokrasi di Asia yang memiliki ambisi geostrategi yang sama di laut: Jepang dan Indonesia. Jepang, sebagai salah satu sekutu terdekat Amerika Serikat di Asia, berada di garda terdepan dalam mempertahankan tatanan liberal di kawasan. Sedangkan, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara yang juga pencetus *Bali Democracy Forum*. Berangkat dari latar belakang ini, penulis menganalisis apa yang dapat dilakukan oleh kedua negara demokrasi ini mengingat kerja sama pertahanan dan keamanan di antara keduanya yang semakin meningkat.

Di era pemerintahan Joko Widodo, Indonesia dan Jepang telah membuat berbagai gebrakan dalam kerja sama pertahanan dan keamanan. Pada Maret 2021, Indonesia dan Jepang akhirnya mengadakan kembali Pertemuan 2+2 setelah pertemuan pertama diadakan pada tahun 2015. Pertemuan lanjutan tersebut menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk mengembangkan transfer teknologi pada sektor alutsista.¹ Dalam sektor non-tradisional, Indonesia dan Jepang memiliki kesamaan pandangan mengenai keamanan maritim. Hal ini ditandai dengan pembentukan *Indonesia-Japan Maritime Forum* -yang diinisiasi pada tahun 2016- yang mempererat kerja sama antara Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dan *Japan Coast Guard* (JCG) setahun kemudian.² Sejak era pemerintahan Abe, arah kebijakan keamanan Jepang telah meluas dan menjadi lebih aktif terlibat dalam sektor tradisional yang melibatkan militer. Konsekuensinya, dalam konteks hubungan dengan Indonesia,



Kementerian Pertahanan Jepang bersama dengan *Japan Self Defense Force* (JSDF) telah mengadakan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas, latihan gabungan, dan transfer teknologi alutsista dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia serta Tentara Nasional Indonesia (TNI). Singkatnya, ada peningkatan dari kerja sama tersebut dibandingkan dengan sebelumnya.

Penulis berargumen bahwa menguatnya hubungan pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Jepang didorong oleh kesamaan nilai demokrasi yang dipromosikan oleh kedua negara. Peningkatan aktivitas keamanan dan militer Jepang di Asia Tenggara kerap dipandang sebagai usaha untuk mengimbangi Tiongkok. Kendati demikian, Indonesia, dengan prinsip bebas dan aktifnya, sangat kecil kemungkinannya untuk berlabuh ke satu blok tertentu. Maka, analisis yang berfokus pada kerja sama yang berdasar pada kesamaan nilai lebih mewakili dalam menggambarkan kerja sama pertahanan dan keamanan Indonesia - Jepang. Untuk itu, pertama, penulis menggambarkan keterkaitan nilai-nilai dan visi yang dipegang oleh kedua negara. Kedua, artikel ini akan mengekspos bagaimana kesamaan nilai-nilai dan visi tersebut dimanifestasikan menjadi peningkatan inisiatif-inisiatif kerja sama pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Jepang.

Analisis

Jepang dan Indonesia memiliki banyak kesamaan dalam perjalanannya menuju demokrasi. Jepang, setelah Perang Dunia II, harus mengalami 7 tahun pendudukan sekutu untuk membangun demokrasi serta mencabut feodalisme dan fasisme yang sudah tertanam begitu dalam. Indonesia, di sisi lain, kendati berbagai nama 'demokrasi' yang dicanangkan oleh berbagai pemerintahan sejak kemerdekaannya, harus melalui jalan yang terjal untuk mencapai demokrasi yang lebih berfungsi melalui 'reformasi' pada tahun 1998.

Terlepas dari perkembangan demokrasi di kedua negara, Jepang dan Indonesia juga memiliki berbagai kesamaan dalam konteks geografis, geopolitik, dan geostrategis. Kedua negara secara geografis merupakan negara kepulauan, memiliki sejarah sebagai penguasa maritim, dan berambisi meraih kemakmuran maritim melalui konteks geostrateginya. Perdana Menteri Jepang sebelumnya, Shinzo Abe memperkenalkan konsep *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) sebagai sebuah visi pada tahun 2016 di depan masyarakat Afrika dalam *Tokyo International Conference on African Development* (TICAD) Nairobi.³ Visi geostrategis ini bertujuan untuk menghubungkan dua pusat pembangunan dunia sepanjang Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Diteruskan oleh suksesornya, Perdana Menteri Suga Yoshihide juga terus mempromosikan visi tersebut dalam kunjungan luar negeri





pertamanya ke Indonesia dan Vietnam yang dinilai sebagai pemain kunci di Asia Tenggara.⁴ Presiden Joko Widodo, pada awal pemerintahannya telah memperkenalkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang mencerminkan ambisi maritimnya. Sebagai perpanjangan dari strategi ini dan cerminan kepemimpinan Indonesia di ASEAN, Indonesia telah memimpin negara-negara ASEAN untuk memformulasikan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)*.⁵ Untuk mencapai visi tersebut, semua yang terlibat harus berkomitmen terhadap nilai yang sama, yaitu *freedom of navigation*.

Untuk mencapai ambisi-ambisi maritim ini, Jepang dan Indonesia, bersama dengan negara-negara lain yang berpandangan sama, perlu menjaga jalur komunikasi dan perdagangan laut yang vital tetap terbuka dan stabil. Sering didefinisikan sebagai *freedom of navigation*, nilai ini sangat erat dengan demokrasi. Kebebasan navigasi diatur oleh aturan alih-alih kekuatan, yang memberikan hak dan akses yang sama ke domain maritim dan tidak ada hierarki atau dominasi satu sama lain. Ditopang oleh demokrasi dan tujuan bersama untuk melestarikan nilai-nilai ini, Jepang dan Indonesia dengan demikian menerjemahkan urgensi ini ke dalam inisiatif keamanan.

Kerja sama pertahanan dan keamanan Indonesia-Jepang bertujuan untuk menjaga demokrasi di laut melalui penajaman kesadaran dan kemampuan masing-masing negara dalam menghadapi tantangan maritim yang mendisrupsi status quo. Pertama, lokakarya yang diberikan oleh JSDF dan Kementerian Pertahanan Jepang kepada lembaga pertahanan dan keamanan Indonesia dapat meningkatkan kesadaran domain maritim dan pemahaman tentang hukum internasional. Selain itu, pertukaran personel militer dan keamanan kedua negara dapat menjadi aset jaringan keamanan antar negara demokrasi. Kedua, dalam prakteknya, Indonesia dan Jepang banyak membangun kerja sama pengembangan teknologi pertahanan, latihan gabungan, dan program peningkatan kapasitas praktis lainnya untuk saling memperkuat kemampuan dalam menghadapi ancaman keamanan yang mendesak, terutama di wilayah maritim.

Kemajuan-kemajuan ini cukup pesat dalam hubungan Indonesia-Jepang di bawah pemerintahan Abe dan kemungkinan akan tetap sama di bawah Suga. Meskipun banyak diskusi dimulai di bawah era Joko Widodo dan Abe, seperti Pertemuan 2+2 pertama pada tahun 2015, banyak dari pembicaraan ini menghasilkan hasil nyata di bawah pemerintahan Joko Widodo dan Suga. Selain kesepakatan transfer teknologi alutsista pada Maret 2021, Indonesia dan Jepang juga telah bertukar nota tentang penyediaan kapal patroli pada Mei 2021.⁶ Pada bulan yang sama, dilaporkan juga bahwa Jepang juga menawarkan Indonesia untuk bersama-sama membangun kapal perang maritim.⁷





Simpulan

Telah terbukti bahwa kerja sama pertahanan dan keamanan Indonesia-Jepang telah berkembang dan semakin intensif dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak kepemimpinan Joko Widodo - Shinzo Abe. Walaupun Indonesia dan Jepang telah membangun kerja sama pertahanan dan keamanan bahkan sebelum kedua pemimpin tersebut berkuasa, tetapi sebagian besar masih berfokus pada isu-isu non-tradisional. Saat ini, kerja sama pertahanan dan keamanan keduanya mulai melibatkan isu-isu tradisional yang memasukkan elemen militer dan transfer alutsista. Namun, hal tersebut tidak serta merta menyiratkan bahwa Jepang bekerja sama dengan Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk melawan Tiongkok, mengingat Indonesia secara strategis independen. Makna yang lebih kuat dari berkembangnya kerja sama pertahanan dan keamanan ini adalah bahwa kerja sama tersebut dapat didorong oleh nilai-nilai bersama, seperti demokrasi, di samping kepentingan yang sama untuk mengimbangi kekuatan tertentu. Tulisan ini melihat bahwa jaringan pertahanan dan keamanan yang didorong oleh nilai-nilai bersama, seperti demokrasi, akan semakin populer.





Endnotes

- 1 Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2021, March 30). "Second Japan-Indonesia Foreign and Defense Ministerial Meeting ("2+2")." Diakses dari https://www.mofa.go.jp/press/release/press6e_000279.html.
- 2 Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2017, December 13). "The Joint Press Release by the Ministry of Foreign Affairs of Japan and Coordinating Ministry of Maritime Affairs of the Republic of Indonesia on the occasion of the visit of Coordinating Minister for Maritime Affairs." Diakses dari <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000323211.pdf>.
- 3 Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2020, August 7). "Free and Open Indo-Pacific." Diakses dari <https://www.mofa.go.jp/files/000430632.pdf>.
- 4 KYODO News. (2020, September 20). "Japan PM Suga mulls Oct. visit to Vietnam, Indonesia, 1st trip abroad." Diakses dari <https://english.kyodonews.net/news/2020/09/71710e7f547c-breaking-news-japans-suga-mulls-trip-to-vietnam-indonesia-in-oct-sources.html>.
- 5 Dewi Fortuna Anwar. (2020). Indonesia and the ASEAN outlook on the Indo-Pacific. *International Affairs*, 96, 111-129.
- 6 Embassy of Japan in Indonesia. (2021, May 24). "Pertukaran Nota (E/N) tentang Penyerahan Kapal Pengawas Perikanan kepada Indonesia." Diakses dari https://www.id.emb-japan.go.jp/news21_16.html.
- 7 The Sankei Shimbun. (2021, May 21). "Japan Offers to Jointly Build Warship with Indonesia". Diakses dari <https://japan-forward.com/japan-offers-to-jointly-build-warship-with-indonesia>.





THC INSIGHTS

THC Insights are timely and policy-relevant analysis of current political, economic and socio-cultural issues affecting Indonesia and the region. The expert observations and recommendations are produced by contributors at The Habibie Center. Disclaimer: The opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily represent those of The Habibie Center.

The Habibie Center was founded by Bacharuddin Jusuf Habibie and family in 1999 as an independent, non-government, non-profit organisation. The vision of The Habibie Center is to create a structurally democratic society founded on the morality and integrity of cultural and religious values. The mission of The Habibie Center are first, to establish a structurally and culturally democratic society that recognizes, respects, and promotes human rights by undertaking study and advocacy of issues related to democratization and human rights, and second, to increase the effectiveness of the management of human resources and the spread of technology.

Contact:

The Habibie Center

Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta 12560

Tel: +62 21 781 7211 | Fax: +62 21 781 7212

Email: thc@habibiecenter.or.id

Website: www.habibiecenter.or.id